

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai *Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) di Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPPI dalam pemberdayaan perempuan pesisir di Bagan Deli mencakup tiga fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan advokat. Sebagai fasilitator, KPPI berperan dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan melalui pelatihan pengolahan hasil laut, pengemasan produk, dan pendampingan usaha. Sebagai motivator, KPPI mendorong perempuan agar memiliki kepercayaan diri, kesadaran gender, dan semangat untuk mandiri secara ekonomi. Sedangkan sebagai advokat, KPPI memperjuangkan pengakuan status perempuan pesisir sebagai nelayan, serta hak-hak sosial seperti kesehatan, sanitasi, dan jaminan keselamatan kerja.
2. Strategi pemberdayaan yang diterapkan KPPI dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan cara memberikan pelatihan keterampilan, memperkuat jejaring kerja sama lintas lembaga, melakukan advokasi kebijakan publik, serta membangun solidaritas antaranggota. Strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kolektif perempuan pesisir agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di lingkungannya.

3. Hambatan yang dihadapi KPPI dalam melaksanakan program pemberdayaan meliputi faktor internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain rendahnya pendidikan, keterbatasan modal, dan sarana prasarana. Sementara hambatan eksternal berasal dari kuatnya budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang pasif dan bergantung pada laki-laki. Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan terhadap program perempuan pesisir masih terbatas.
4. Upaya yang dilakukan KPPI untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pendekatan sosial-budaya melalui sosialisasi kepada suami dan tokoh masyarakat, menjalin kerja sama dengan pemerintah, universitas, serta lembaga swadaya masyarakat, memfasilitasi akses permodalan dan legalitas usaha (seperti kartu KUSUKA), serta melakukan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok usaha perempuan pesisir.

5.2 Saran

1. Bagi KPPI, diharapkan dapat terus memperkuat pendampingan berkelanjutan pascapelatihan agar keterampilan yang diperoleh perempuan pesisir dapat diterapkan secara maksimal dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas. KPPI juga perlu memperluas jejaring kemitraan dengan lembaga permodalan dan sektor swasta agar akses modal bagi perempuan pesisir semakin terbuka.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait, perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap komunitas perempuan pesisir seperti KPPI, baik dalam bentuk program pelatihan, bantuan alat produksi, maupun kebijakan afirmatif

yang memberikan kemudahan akses pembiayaan, legalitas usaha, dan perlindungan sosial bagi perempuan pesisir.

3. Bagi Masyarakat Pesisir dan Keluarga, diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Perubahan pola pikir patriarki perlu terus didorong agar perempuan dan laki-laki dapat berperan sejajar dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang meninjau efektivitas program KPPI dalam jangka panjang, khususnya terkait peningkatan ekonomi rumah tangga, penguatan kelembagaan perempuan pesisir, dan dampak sosial terhadap perubahan struktur peran gender di masyarakat pesisir.